SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar (SI)

Oleh :

YULI DAYANTI
218110008

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT

Oleh;

YULI DAYANTI
NIM. 218110008

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023

Tim Penguji

Dr. H. Abdurahman, M.M PU ( )
NIDN.0804116101

Salmin, S.Pd., M.Si PP ( )
NIDN. 0805037201

Drs. Mintasrihardi, M.H PN ( )
NIDN. 0830016101

Mengetahui
Ketua Program Prodi Studi Administrasi Publik

Rahmad hidayat, S. AP, M. AP
NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT

Oleh;

YULI DAYANTI
NIM. 218110008

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023

Tim Penguji

Dr. H. Abdurahman, M.M PU ( )
NIDN.0804116101

Salmin, S.Pd., M.Si PP ( )
NIDN. 0805037201

Drs. Mintasrihardi, M.H PN ( )
NIDN. 0830016101

Ilmu Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Yuli Dayanti

Nim : 218110008

Memang benar Skripsi yang berjudul "**Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat**" adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dianjukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Mataram. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan bimbingan dan terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan, termasuk bersedia meninggalkan gelar sarjana yang akan saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 1 Februari 2023

Yang membuat pernyataan

Yuli Dayanti

218110008

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULI DAYANTI
NIM : 218110008
Tempat/Tgl Lahir : Setanggor, 11 November 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 085 338 316 809
Email : yulidayanti18@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 80%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 01 / 02 / 2023
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 BD6DFAKX281607473

YULI DAYANTI
NIM. 218110008

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

v

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULI DAYANTI
NIM : 218 11 0008
Tempat/Tgl Lahir : Setanggor, 11 November 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085 338 316 809 / yulidayanti18@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 01 Februari 2023
Penulis

YULI DAYANTI
NIM. 218110008

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

vi

MOTTO

"Only you can change your life. Nobody else can do it for you"

Orang lain ga' akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, mereka hanya tahu bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga' ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan oleh Allah SWT, serta dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang Ibunda dan Ayahanda yang selama ini selalu menyayangi dan mendo'akanku disetiap langkahku, skripsi ini adalah sebagai tanda cinta dan baktiku kepada kalian yang selama ini sudah banyak berkorban demi tercapainya cita-citaku.
2. Almamater Hijau tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik.
4. Bapak Drs.H. Abdurrahman, M.M., selaku dosen pembimbing I.
5. Bapak Salmin, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbim II
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Keluarga besar Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat.
9. Orang tua dan juga anggota keluarga serta kerabat yang senatiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai.
10. Seluruh teman-teman yang selalu mendukung saat mengerjakan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Mataram, 15 Juli 2022

Penulis,

Yuli Dayanti

EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) TERHADAP MASYARAKAT DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT

Yuli Dayanti[1] Abdurrahman[2], Salmin[3]
[1]Mahasiswa, [2]Pembimbing Utama, [3]Pembimbing
[123]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Menanggulangan Kemiskinan di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini memfokuskan pada seberapa besar peran dan manfaat Kartu Keluarga Sejahtera dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif (pemahaman, pandangan, dan tanggapan) pada responden di lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran implementasi program di lapangan secara sistematis dan faktual. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, studi pustaka, dan observasi. Penentuan responden di lakukan secara Snowball sampling, yakni atas dasar penelitian bahwa para responden mengetahui secara baik permasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, responden dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK) dan telah membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program ini dinilai efektif dan efisien karena Dinas sosial telah melakukan sosialisasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada para penerima kartu manfaat dengan memberi pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat terkait bantuan program KKS. Penentuan penerima KKS di Desa Setanggor ditentukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) hasil Musdes di input oleh operator Desa yang dilakukan setiap satu bulan sekali, hasil dari musdes kemudian di serahkan ke Dinas Sosial untuk dikirim ke Kementrian Sosial RI yang selanjutnya data diolah oleh Kementrian Sosial. Sistem mekanisme pencairan dana KKS mereka hanya mengetahui pencairan KKSnya melalui agen bansos, ketika pencairan KKSnya agen memberi tahu siapa saja yang mendapat KKS dan lasung disuruh mengambil (mencairkan) KKSnya di agen tersebut dan untuk menginformasikan kepada penerima yang lain bahwa KKSnya sudah bisa dicairkan.

Kata Kunci : **Efektivitas, Program KKS, Menanggulangi Kemiskinan**

THE EFFECTIVENESS OF THE PROSPER FAMILY CARD (KKS) PROGRAM IN ALLEGING POVERTY IN SETANGGOR VILLAGE, PRAYA BARAT DISTRICT

Yuli Dayanti[1], Drs. H. Abdurrahman, MM[2], Salmin, M.Si[3]
Student[1], Main Advisor[2], Assistant Advisor[3]
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the efficacy of the Prosperous Family Card Program (KKS) in alleviating poverty in Setanggor Village, West Praya District, Central Lombok Regency. This study examines the significance and benefits of the Family Welfare Card in overcoming poverty. The study employed a qualitative method (understanding, perspectives, and responses) to field respondents, yielding descriptive data, namely a systematic and factual account of program execution in the field. In-depth interviews with informants, as well as documentation studies, literature studies, and observations, were used to collect data. Determination Snowball sampling was used to select respondents, which is based on studies indicating the respondents are well-versed in the subject under investigation. As a result, the respondents in this study are residents of Setanggor Village, West Praya District, Central Lombok Regency. According to the findings of the study, the implementation of the Card Program Prosperous Families in Setanggor Village, West Praya District, Central Lombok Regency followed the procedures established by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TN2PK) and assisted the poor in meeting their daily needs. This program is regarded effective and efficient because the social service has socialized the Prosperous Family Card Program (KKS) to benefit card recipients by offering knowledge or education about KKS program support to the public. The Village Deliberation (Musdes) is used to determine KKS beneficiaries in Setanggor Village. The results of the Musdes are inputted by the Village operator once a month, and the results of the Musdes are then submitted to the Social Service to be sent to the Indonesian Ministry of Social Affairs, where the data is then processed. Their KKS fund disbursement mechanism system only knows about KKS disbursement through social assistance agents; when the KKS disbursement occurs, the agent notifies anyone who has received the KKS and is immediately told to pick up (disburse) the KKS at the agent and to notify other beneficiaries that the KKS is available for disbursement.

***Keywords**: Effectiveness, PSC Program, Overcoming Poverty*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
P3B Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **v**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

2.1 Penelitian Terdahulu 9

2.2 Pengertian Dan Ruang Lingkup Efektivitas 12

2.2.1 Pengertian Efektivitas 12
2.2.2 Ukuran Efektivitas 13
2.2.3 Pendekatan Efektivitas 16
2.3 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 17
2.3.1 Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera 17
2.3.2 Fungsi KKS 18
2.3.3 Manfaat KKS 19
2.3.4 Sistem Penentu Penerimaan KKS 19
2.4 Kemiskinan 24
2.4.1 Pengertian Kemiskinan 24
2.4.2 Jenis-Jenis Kemiskinan 24
2.4.3 Indikator Dan Ukuran Kemiskinan 25
2.4.4 Pertumbuhan Ekonomi 26
2.4.5 Penanggulan Kemiskinan 29
2.4.6 Penyebab Kemiskinan 30
2.5 Kerangka Berfikir 40
BAB III METODE PENELITIAN 41
3.1 Jenis Penelitian 41
3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian 42
3.3 Penentuan Responden Dan Informan 43
3.4 Jenis Dan Sumber Data Penelitian 44
3.5 Tekhnik Pengumpulan Data 44
3.6 Variable Penelitian Dan Definisi Operasional 46

3.7 Teknik Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....49

4.1 Gambaran Umum 49

4.1.1 Sejarah Desa Setanggor 49

4.1.2 Letak geografis desa 49

4.1.3 Sarana Dan Prasarana 52

4.1.4 Struktur dan Tata Pemerintah Desa Setanggor 55

4.2 Hasil Penelitian 55

4.2.1 Dampak Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Penamggulangi Kemiskinan Di Desa Setanggor 55

4.2.2 Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah 61

BAB V PENUTUP.....68

5.1 Kesimpulan.....68

5.2 Saran 69

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN.....72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin di Desa Setanggor Tahun 2019-2021 5

Tabel 2.2 Jumlah Penerima program kartu keluarga sejahtera (KKS) di Desa Setanggor tahun 2019- 2021 6

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....43

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 51

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia.....51

Tabel 4.3 Jumlah Sekolah Dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan 52

Tabel 4.4 Sarana Prasarana Keagamaan.....52

Tabel 4.5 Perkembangan Sarana Dan Prasarana KesehatanTahun 2018- 2020 53

Tabel 4.6 Jumlah KK Dan Penduduk Per Dusun Desa Setanggor Tahun 2021 54

Tabel 4.7 Daftar Informan dari Pemerintah dan Tokoh Masyarakat 56

Tabel 4.8 Daftar Informan dari Masyarakat Penerima Kartu Keluarga Sejahtera.....57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka berfikir 21

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....40

Gambar 4.1. Struktur dan Tata Pemerintah Desa Setanggor 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian 73

Lampiran 2. Lembar Konsultasi Skripsi 74

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang. Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, jumlah penduduk yang banyak sehingga membuat Indonesia berusaha untuk melakukan pembangunan disegala sektor. Pembangunan itu dilakukan untuk mengubah kehidupan kearah yang lebih baik dari masa kemasa. Dan salah satu tujuan pemerintah Indonesia merupakan untuk mengentaskan kemiskinan. (Fiolita 2020:4).

Kemiskinan merupakan masalah yang dimiliki disetiap negara dan salah satunya di negara Indonesia. Kemiskinan adalah permasalahan multidimensi. Memiliki banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, Pemerintah harus mencari jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan. jenis kemiskinan multidimensional, yang tidak hanya mencakup dimensi ekonomi tetapi juga dimensi sosial, dimensi politik, dimensi budaya, aspek kesehatan, pendidikan, dan sejarah, serta dimensi perdamaian dunia. Di awal konstitusi dinyatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara berkembang yang sistem negara kesejahteraan. yang tecantum pada pembukaan undang-undang dasar 1945. Kesejahteraan sudah sejak lama menjadi impian bangsa Indonesia hingga sekarang masih belum tercapai. Menurut Khairul (2019:1)

Kesejahtraan ialah sesuatu atau keadaan sejahtera, keselamatan dan keamanan, kententraman. Secara umum, sejahtera menujukan keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan Makmur, dalam keadaan sehat dan damai (id.wikipedia.org). Kemiskinan di Indonesia bisa dilihat melalui badan pusat statistik (BPS), Pada bulan September 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 27,55 juta jiwa, meningkat 1,13 juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada bulan Maret 2020. Informasi ini diperoleh dari data statistik. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan naik 2,76 juta orang jika dibandingkan dengan September 2019. Kenaikan tingkat kemiskinan ini disebabkan oleh pandemi virus COVID-19. Karena banyaknya aspek yang saling berhubungan, konsep kesejahteraan dapat dipahami secara kompleks. Secara umum, kesejahteraan seseorang dapat dievaluasi berdasarkan demografi, ketersediaan pangan yang cukup, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan faktor lingkungan.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) berganti nama menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai dua identitas bagi penerima program perlindungan sosial. Dalam menjalankan dua program-program perlindungan sosial, Pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program simpanan Keluarga Sejahtera, program Indonesia pintar, program Indonesia sehat untuk membangun

keluarga yang produktif. Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada para pejabat tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dengan melibatkan menteri terkait, Gubernur, Bupati/Walikota, dan tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan koordinasi dan evaluasi.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang meningkat. Menurunkan daya belinya bagi masyarakat yang tidak mampu. Menanggapi Hal ini, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok akibat kenaikan harga. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Sosial (KEMENSOS) meluncurkan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada April 2016 yang dibagikan kepada masyarakat melalui PT. POS Indonesia. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah membuat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu keluarga sejahtera (KKS) termasuk keluarga produktif bersamaan dengan Kartu Keluarga Tabungan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Pemberdayaan, (Yolanda, 2017:2).

Pemerintah Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk meningkatkan produktifitas program-program kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu contoh adalah program KKS yang dikenal dengan Kartu Keluarga Sejahtera Menurut Pasal 2 Peraturan Nomor 166 Tahun 2014 yang Dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Tentang

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat penanggulanangan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial .
2. Program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
   a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera
   b. Program Indonesia Pintar
   c. Program Indonesia Sehat

Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu. Sebagai pengganti kartu perlindungan sosial (KPS). Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014, terdiri dari tiga kartu, salah satunya adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menunjukkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten (TKSK) diperlukan untuk efisiensi program KKS. Seseorang diberi tugas dan wewenang oleh Kementerian Sosial Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten untuk jangka waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disesuaikan dengan wilayah yang ditugaskan oleh kecamatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK). Peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. (Wahyudi, 2019:7:8)

Karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan tersebut, maka kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah menimbulkan banyak sekali baik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Dikarenakan kebijakan yang buat oleh pemerintah tidak luput dari "ketidak adilan".

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin di Desa Setanggor Tahun 2019-2021

No	Tahun	L	P	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk miskin
1	2019	2097	2173	4270	1.299
2	2020	2019	2071	4090	1.091
3	2021	2010	2169	4179	1.054

Sumber : Profil Desa Setanggor

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah 4270 dengan jumlah penduduk laki-laki 2097 dan jumlah penduduk perempuan 2173 sedangkan jumlah penduduk terbanyak kedua adalah ditahun 2021dengan jumlah. Penduduk laki-laki 2010 dan jumlah penduduk perempuan 2169 untuk jumlah penduduk di tahun 2020 adalah 4090 dengan jumlah penduduk laki laki sebanyak 2019 dan jumlah penduduk perempuan 2071. Jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami perubahan semakin betambah penduduk miskin dari tahun 2019 sebanyak 1.054 penduduk miskin bertambah banyak ditahun 2020 sebanyak 1.091 sedangkan ditahun 2021 semakin dan terlihat di table dari tahun sebelumnya peningkatan jumlah kemiskinan yang ada di Desa Setanggor.

KKS adalah suatu program bantuan yang dirancang oleh pemerintah untuk rakyat miskin. Salah satu kebijakan pemerintah dikarenakan kenaikan bahan pokok di Indonesia membuat rakyat-rakyat miskin mengalami krisis makanan karena tidak bisa membeli makanan dikarenakan harga mahal. Desa setanggor juga menjadi salah satu lokasi yang masyarakatnya mendapatkan bantuan program kartu keluarga sejahtera karena tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Setanggor tahun 2019- 2021

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	597
2.	2020	620
3.	2021	501

Sumber: Profil Desa Setanggor

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah maksimum orang yang akan mendapatkan bantuan dari program Kartu Keluarga Sejahtera adalah 620 orang pada tahun 2020, sedangkan jumlah orang yang akan menerima bantuan dari program KKS kedua pada tahun 2019 adalah 597 orang, dan jumlah orang yang akan menerima bantuan dari Program KKS tahun 2021 sebanyak 501.

Sejak dibentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK) sehingga terbentuk Program Kartu Keluarga Sejahtera yang diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Dari hal tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat dengan mayoritas penduduk adalah petani, sehingga penulis tertarik

mengambil judul ***"Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa SetanggorPraya Barat".***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan diatas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Setanggor?
2. Bagaimana dampak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi masyarakat miskin penerima Kartu Keluarga Sejahatera di Desa Setanggor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Setanggor.
2. Untuk mengetahui dampak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi masyarakat miskin penerima Kartu Keluarga Sejahatera di Desa Setanggor.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diatas sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan mendalami kajian teori khususnya Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Setanggor Kecamatan Lombok Tengah.

1.4.2 Aspek Praktis

a. Manfaat untuk Masyarakat

Untuk membantu masyarakat miskin dan pentingnya bagi masyarakat dengan adanya Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah.

b. Manfaat untuk Pemerintah

Penelitian ini bisa diterapkan oleh pemerintah setempat dalam membantu masyarakat yang kurang mampu atau dikategorikan masyarakat miskin di pelosok. Terutama masyarakat miskin penerima KKS di Lombok Tengah Desa Setanggor.

1.4.3 Aspek Akademis

Sebagai bahan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar (S1) pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Matataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian pustaka yang bersumber dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan yang dijadikan acuan dalam penelitian sebelumnya yang menggambarkan secara terpadu hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan tinjauan yang bersumber dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah dilakukan analisis literatur penelitian sebelumnya, maka penelitian yang dijadikan acuan untuk kajian literatur penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wahyudi (2019) dengan judul penelitian "Pendistribusian Dana KKS Untuk Mengurangi Angka Kemiskinan" (Desa Arjo Asri VIII) Sumber data primer penelitian ini adalah aparatur Desa Rejo Asri VIII dan masyarakat penerima KKS. Sumber data sekunder adalah jurnal tesis dan buku-buku tentang KKS, dan teknik pengumpulan data sekunder adalah membaca tesis dan jurnal tentang KKS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dan sifat penelitian ini adalah kualitatif. Metode penalaran induktif, berfokus pada manajemen data dalam urutan terbalik dari umum ke khusus. Evolusi sistem KKS di Desa Rejo Asri VIII mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya, cara pengembalian yang semula dilakukan melalui kantor pos, kini dilakukan melalui ATM. yang semula hanya 21 KK di tahun 2015 namun bertambah

menjadi 33 KK di tahun 2016. Persamaan penelitian ini membahas tentang kartu keluarga sejahtera (KKS) dan perbedaan penelitian ini adalah lokasi dan metode penelitian. Dimana lokasi peneltian ini di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah Dan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.

2. Dara Yolanda Framita (2017). Judul penelitian "Impelementasi Program Kartu Sejahtera Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Tinggi Kacamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang" Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif *(qualitative research)*. Cara utama untuk mendapatkan data primer melalui penggunaan teknik pengumpulan data termasuk melakukan wawancara, melakukan observasi, dan membuat laporan. Berdasarkan temuan penelitian ini, pelaksanaan KKS dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa belum dapat dilakukan secara efektif karena terdapat sumber pembiayaan yang belum dapat disalurkan. Oleh karena itu, kami belum mengetahui apakah program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak, namun berdasarkan pembagian kartu, sepertinya ini solusi yang paling efektif. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, dan keduanya akan membahas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah kesamaan antara kedua penelitian. namun pada penelitan terdahulu

membahas tentang implementasi sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas tentang efektivitasnya. Perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian dan metode penelitian. Dimana lokasi penelitan terdahulu ini Desa Gunung Tinggi Kacamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan metode penelitan menggunakan kualitatif deskriptif, sedangkan penelitan ini dilakukan di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

3. Rahman Padilah, Dedi Hermon, Rery Novio (2019) Judul Penelitian " Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bantuan Keluarga Sejahtera (Kks) Di Nagari Candung Koto Leweh " jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif .pengambilan sampel berdasarkan teknik proposional random sampling. Tenik pegumpulan data melalaui kuisioner atau angket dan dokumentasi dan teknik analisis data presentase. Hasil dari penelitian ini menujukan pemberian KKS belum sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena penerima bantuan KKS yang diberikan oleh pemerintah belum cukup untuk memenuhi kebeutuhan pokok masyarakat. Ketepatan sasaran penerima KKS merupakan aspek utama kelemahan program KKS karena tidak seluruh rumah tangga miskin yang menerima KKS dan banyak rumah tangga rumah tangga tidak miskin menerima bantuan tersebut. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitan yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sama-sama

menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Namun, pada penelitan terdahulu membahas tentang kondisi sosial ekonomi sedangkan pada penelitian membahas tentang efektivitasnya. Perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian dan metode penelitian. Dimana lokasi penelitan terdahulu ini di Nagari Candung Koto Laweh Padang metode penelitan menggunakan kualitatif deskriptif, sedangkan penelitan ini dilakukan di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

2.2 Teori Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah efektifitas (atau sejenis kata benda) berasal dari kata efektif (kata sifat). Sementara efetifitas memiliki pengertian "keefetkifan "mengacu pada sejauh mana seseorang mencapai tujuan. Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektifitas dalam bahasa inggris "effective" yang telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memliki makna "berhasil guna ".

Efektivitas merupakan suatu keadaan menyelesaikan pembelajarannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah mencapai tujuan yang diantisipasi atau dimaksudkan.

Menurut siagia dalam indrawijaya (2020), memberikan penjelasan bahwa dianggap sangat baik atau tidak berdasarkan metode pelaksanaan serta biaya yang digunakan.. Sedangkan efektivitas yang dikemukaan oleh ahdi (2010) yaitu bagi sebuah organisasi untuk berhasil dalam cara mencapai

tujuannya, terlepas dari kenyataan bahwa itu mungkin efisien dalam cara melakukannya. Efektivitas suatu organisasi meningkat sebanding dengan sejauh mana tujuannya sejajar dengan tujuan anggota individu. Hasibun menyatakan bahwa efektivitas adalah sasaran tujuan yang jelas. Pernyataan sering termasuk bahasa yang efektif dalam hal bahasa yang efisien..

2.2.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya bergantung pada siapa yang melakukan evaluasi dan interpretasi. Ketika produktivitas dipertimbangkan, seorang manajer produksi menawarkan kesadaran bahwa efektivitas mengacu pada kualitas serta kuantitas (output) produk dan jasa. Namun, jika usaha atau hasil perkerjaan dan tindakan yang diharapkan maka hal itu tidak efektif.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, dipaparkan sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini di maksudkan supaya pekerja dalam pelaksanaan tugas mencapai tujuan yang ingin dicapai dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, dimana diketahui bahwa strategi tersebut “on the road” yang diikuti dengan melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, agar para pelaksana tidak mengalami disorientasi dalam bekerja.

3. Proses analisis dan perumusan suatu kebijakan yang sehat, yang dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, mengandung arti bahwa kebijakan harus dapat menyesuaikan antara tujuan dengan upaya yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan operasional.
4. Pada intinya, perencanaan yang cermat adalah memilih terlebih dahulu tindakan apa yang akan diambil organisasi di tahun-tahun mendatang.
5. Pembuatan program yang sesuai dari rencana yang baik masih harus diterjemahkan ke dalam program implementasi yang tepat karena, jika langkah ini dilewati, individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut akan kehilangan aturan atas tindakan dan pekerjaannya.
6. Kapasitas kerja merupakan salah satu tolak ukur efektifitas suatu organisasi beroperasi, dan salah satu indikatornya adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja.
7. Secara produktif. menggunakan sumber daya dan infrastruktur yang tersedia, beberapa di antaranya mungkin telah disediakan oleh organisasi itu sendiri..
8. Pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Tidak masalah seberapa bagus sebuah program; jika tidak diterapkan secara efektif atau efisien, organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Hal ini karena organisasi semakin dekat untuk mencapai tujuannya dengan setiap keberhasilan pelaksanaan program.

9. Sistem pemantauan dan pengendalian yang mencakup unsur-unsur pengajaran Mengingat fakta bahwa sifat manusia pada dasarnya tidak sempurna, keberadaan sistem pemantauan dan pengendalian diperlukan untuk efisiensi organisasi. kriteria dalam pengukuran efektvitas, yaitu:

   1) Efisiensi dalam bekerja

   2) Kemampuan adaptasi kerja

   3) Kepuasan kerja

   4) Kemampuan berlaba

   5) Pencairan sumber daya

Sedangkan Richard M. Streers (dalam tangkilisan, 2005) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan. Untuk memastikan bahwa tujuan akhir tercapai, tahapan harus diikuti dan setiap tahapan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, setiap target harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.
2. Integrasi. Integrasi adalah cara untuk mengukur seberapa baik sebuah organisasi mampu berkomunikasi dengan orang lain, membangun konsensus, dan melakukan penjangkauan..
3. Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk berubah sebagai respons terhadap lingkungannya. Inilah sebabnya mengapa tolok ukur digunakan untuk mengukur proses pengadaan dan perekrutan Afrilia (2021:1)

2.2.3 Pendekatan efektivitas

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur keefektifan suatu kegiatan, diantaranya adalah 'pendekatan keefektifan'. Pendekatan ini melihat seberapa baik suatu kegiatan mencapai tujuan yang dimaksudkan.

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan sasaran/target untuk mengukur efektivitas melihat seberapa baik suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuannya. Sasaran penting yang perlu diperhatikan dalam mengukur efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis yang memperhitungkan masalah-masalah yang dapat timbul, dan fokus pada aspek keluaran, yaitu mengukur keberhasilan pencapaian tingkat keluaran yang direncanakan. Titik efektivitas juga mempertimbangkan faktor waktu pelaksanaan, sehingga program akan lebih efektif dari waktu ke waktu. Contoh pendekatan target adalah jika suatu pekerjaan mempunyai target barang habis terjual dalam waktu 1 minggu, dan barang habis terjual dalam waktu 1 minggu, maka pekerjaan tersebut efektif.

b. Pendekatan sumber (*system resource Approach*)

Pendekatan sumber untuk efektivitas menilai kemampuan lembaga untuk mengakses dan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuannya. Pendekatan ini didasarkan pada teori bahwa lingkungan lembaga sama-sama terbuka terhadap lingkungannya,

memungkinkan lingkungan tersebut menyediakan sumber daya yang dibutuhkan lembaga untuk mencapai tujuannya. Inti dari pendekatan sumber adalah untuk melihat seberapa besar upaya anggota program bisnis dalam bekerja sama dengan lingkungan sekitar untuk mencapai kesuksesan

c. Pendekatan proses (*internal process Approach*)

Pendekatan proses berfokus pada efisiensi dan kesehatan suatu institusi internal dengan mempertimbangkan bagaimana bagian-bagian yang ada bekerja sama secara harmonis. Itu mengabaikan lingkungan eksternal dan berfokus pada kegiatan yang terjadi pada sumber daya lembaga. Hal ini menunjukkan betapa efektif dan sehatnya lembaga tersebut.

2.3 Teori Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang dikeluarkan pemerintah yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu sebagai pengganti kartu perlindungan sosial. Sebelumnya, kartu perlindungan sosial berbentuk uang tunai, sedangkan kartu keluarga sejahtera berbentuk non tunai. Kartu ini berfungsi sebagai penanda bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sebelumnya KPS bentuknya adalah tunai sedangkan KKS sudah berbentuk nontunai. KKS ini diterbitkan oleh sejumlah lembaga keuangan yang semuanya tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). KKS adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh salah satu bank berikut: Bank Mandiri, BNI, BRI, atau BTN.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diperlukan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan ini dapat berupa bantuan sosial tunai (BST) sebesar 500.000 rupiah, atau dapat berbentuk bantuan nontunai (BSNT) berupa sembako, telur, kedelai, dan buah-buahan.

Sesuai Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 2014 tentang "pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar, dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif, sosialisasi kebijakan penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM)", Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan salah satu bentuk bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Sementara itu, KKS merupakan salah satu inisiatif yang termasuk dalam paket kompensasi yang direkomendasikan pemerintah untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah dan rentan yang terkena dampak negatif kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut arahan presiden, tujuan kartu keluarga sejahtera adalah untuk memerangi masalah kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Yolanda (2017:3).

2.3.1 Fungsi Kertu Keluarga Sejahtera

Fungsi kartu keluarga sebagai.

a. Tarik tunai dari KKS
b. setor tunai kerekening KKS
c. Cek saldo KKS
d. Cek mutasi rekening KKS
e. Terima dan transfer uang

2.3.2 Manfaat Kartu Keluarga Sejahtera

a. KKS ini mampu menyimpan kuota bantuan sosial yang diterima dari pemerintah.
b. KKS dapat digunakan untuk mengumpulkan bantuan beras maupun Baantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
c. Kartu ini dapat digunakan sebagai uang elektronik, kartu debit, atau ATM, yang semuanya dapat digunakan untuk operasional perbankan seperti penarikan saldo, penetapan kredit, pembayaran tagihan, dan kegiatan sejenis lainnya.
d. Selain itu, kartu ini dapat digunakan dengan cara yang sama seperti kartu ATM standar yang dapat digunakan untuk menyimpan uang.

2.3.3 Sistem Penetuan Penerima Kartu Keluarga Sejahtera

Ada beberapa sistem penentu penerima KKS sebagai berikut:

a. Fase inteligensi (*intelligence*)

Merupakan suatu metode penyederhanaan dan identifikasi luasnya kesulitan yang muncul dalam proses pemilihan calon penerima manfaat dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, merupakan prosedur yang. Mengumpulkan data, memeriksa sistem operasi secara detail dalam bentuk flowchart dokumen, dan menganalisis kekurangan dari sistem yang sedang berjalan adalah tugas-tugas yang dilakukan selama tahap ini.

b. Fase desain (*desigen*)

Pada Fase ini, hal yang lakukan adalah mengidentifikasi, menilai, dan menerapkan solusi potensial untuk masalah untuk menentukan siapa yang berhak menerimanya. Langkah ini mengikuti proses pemahaman masalah, mengembangkan solusi potensial dan mengujinya untuk melihat apakah solusi tersebut layak. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain menentukan kriteria dan bobot yang digunakan untuk mengambil nilai setiap opsi, melakukan simulasi untuk menguji kelayakan solusi, dan menghitung judgment berdasarkan hasil tersebut.

c. Fase pemilihan (*choice*)

Proses pemilihan/seleksi dilakukan dengan melihat berbagai kemungkinan solusi dan memilih yang terbaik dari suatu model. Model ini memberikan nilai untuk variabel keputusan dalam alternatif yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pemilihan adalah model dan perencanaan implementasi.

d. Fase implementasi (*implementation*)

Pada fase ini, beberapa solusi potensial sudah dijalankan, dan berbagai tindakan berbeda dipertimbangkan untuk menemukan yang terbaik. Proses ini termasuk mencari umpan balik dan saran, serta membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia (Nurjoko, Dona, 2015:4).

Program bansos pangan adalah program yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020 dan merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program ini diberikan kepada penerima bantuan untuk mengakses sembako melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai instrumen yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan program Sembako kepada KPM yang memiliki fitur tabungan dan/atau uang elektronik yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bansos.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan desain tampilan di bawah ini merupakan alat pembayaran yang digunakan sebagai sarana penyaluran dana bantuan dari program Sembako ke KPM. Desain ini dapat dilihat di bawah ini:

Gambar. 2.1 Kartu Keluarga Sejahtera

1. Untuk program Sembako, kartu KKS berfungsi sebagai mekanisme transaksi program Sembako, maka KPM wajib membawanya setiap kali menggunakan bantuan keuangan.
2. Nilai atau besaran manfaat yang diterima dari program sembako disimpan di KKS. KPM wajib memanfaatkan sepenuhnya dana bantuan yang diberikan oleh program Sembako. Pembayaran tunai bukanlah

pilihan untuk menyalurkan dana untuk program sembako.

3. Nama Pengurus KPM, nomor KKS, nama bank penyalur, dan nomor telepon pengaduan semuanya dicantumkan dalam KKS.
4. KKS dari Bank Penyalur dilengkapi dengan PIN (*personal identification number*), khususnya 6 (enam) digit yang digunakan untuk mengakses rekening yang bersangkutan selama berlangsungnya transaksi.
5. Dilarang bagi siapapun kecuali KPM untuk menyimpan KKS dan PIN.

Masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai peserta program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dijalankan Kementerian Sosial untuk mendapatkan Kartu Sembako Murah atau Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua kartu ini dikeluarkan oleh pemerintah. Langkah selanjutnya adalah seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a. Bagi yang berminat menjadi KPM akan dikirimkan surat pemberitahuan yang merinci proses pendaftaran di lokasi yang telah ditentukan. Informasi yang telah disampaikan oleh masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari program ini selanjutnya diolah secara paralel dan sinergis oleh bank-bank yang tergabung dalam organisasi Bank Milik Negara (Himbara), kantor kecamatan, dan walikota/ kantor kabupaten.
b. Setelah verifikasi data penerima selesai, penerima bantuan sosial akan dapat membuka rekening bank dan akan diterbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu nontunai untuk bantuan sembako.

c. Masyarakat yang mendapat bantuan pemerintah dan sudah memiliki KKS dapat langsung mendatangi E-warung (Elektronik Warumg Gotong Royong) terdekat untuk menggunakan KKS-nya untuk melakukan transaksi pembelian bahan makanan.

Agen bank, pedagang, atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditunjuk sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian komponen pangan oleh KPM disebut e-Warung. Pesta ini juga dikenal sebagai e-Warung. Beberapa contoh e-warung antara lain pasar dan warung tradisional, serta toko kelontong, warung kampung, bahkan Rumah Pangan Kita (RPK).

Berikut jenis makanan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong dengan menggunakan uang bantuan program Sembako:

a. Nasi atau masakan daerah lainnya, seperti jagung pipilan dan sagu, dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat.
b. Telur, daging, ayam, dan ikan merupakan contoh makanan yang mengandung protein yang berasal dari hewan.
c. Kacang-kacangan, seperti tempe dan tahu, serta sumber protein nabati lainnya.
d. Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buah-buahan.

Pemilihan komoditas pangan yang masuk dalam Program Sembako dilakukan dengan maksud untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Melalui pemanfaatan komponen pangan yang disediakan oleh KPM, Program Pangan Pokok mampu memenuhi kebutuhan gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan

(HPK) yang dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak berusia antara 6 hingga 23 tahun. bulan. Ini membantu mencegah perkembangan stunting. Pangan dari program Pangan Pokok diubah menjadi Makanan Pendamping ASI untuk anak usia 6–23 bulan sebagai bagian dari program Pangan Pokok (MP-ASI). Berikut adalah contoh barang yang tidak dapat dibeli dengan dana dari Program Bantuan Pangan: minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrik, makanan kaleng, mie instan, dan komponen makanan lainnya yang tidak ditentukan pada butir d di atas. Selain itu, bantuan tidak dapat digunakan untuk membeli barang-barang seperti rokok atau kacang kering.

2.4 Kemiskinan

2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata "miskin" yang berarti sedikit atau tidak punya uang dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik mendefinisikannya sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan mendasar seseorang, seperti yang berkaitan dengan gizi, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, merupakan ciri khas kemiskinan. (Wahyudi, 2019:16).

2.4.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Adapun jenis kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kekurangan uang yang menghalangi seseorang untuk memiliki akses yang memadai ke fasilitas

umum atau kebutuhan mendasar, seperti pakaian, pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan yang layak, dan makanan yang cukup.

b. Kemiskinan relatif adalah kuran seberapa miskin sekelompok orang tertentu dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, berdasarkan distribusi pendapatan mereka.

2.4.3 Indikator Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan

a. Indikator Kemiskinan

Menurut sayogyo (dalam suwadi (2014: 27) menjelskan tentang teori dan lincolin arsyad kemiskinan Dapat dilihat atau diukur dari:

1) Indikator tingkat konsumsi beras menentukan berapa banyak beras yang dimakan setiap tahun oleh setiap individu, dengan perincian pada tiga jenis kemiskinan: sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.
2) Indikator tingkat pendapatan didasarkan pada pendapatan per kapita. Garis kemiskinan, yang merupakan ukuran jumlah orang yang hidup di bawah tingkat kemiskinan tertentu, didasarkan pada biaya pengeluaran satu dolar amerika per hari. Jika biayanya dua dolar AS per hari, maka orang tersebut dianggap hidup dalam kemiskinan

b. Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian yaitu:

1) Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan yang ditentukan oleh pemerintah suatu negara. Jika pendapatan seseorang turun di bawah garis ini

dan mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka akan diklasifikasikan sebagai hidup dalam kemiskinan. Ada standar yang berbeda untuk mengukur kemiskinan, dan ini ditentukan oleh negara tempat terjadinya. Contoh pengukuran kemiskinan absolut adalah mengukur persentase populasi yang menginginkan barang mewah

2) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh cara suatu budaya berperilaku, dengan nilai-nilai, pemikiran, dan cara kerjanya.
3) Kemiskinan struktural adalah suatu bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang melekat pada kelompok masyarakat tertentu dan memungkinkan berlangsungnya kondisi dimana kelompok tersebut tidak dapat mengakses sumber daya yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

2.4.4 Definisi Kemiskinan

Menurut Chambers (dalam Amir Mahmud, 2016) mengatakan bahwa Kemiskinan adalah gagasan komprehensif yang dapat dipecah menjadi lima kategori berikut: (1) Kemiskinan (*proper*), (2) Ketidakberdayaan (*powerless*), 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4. Ketergantungan (*dependence*), dan 5. Keterasingan *(isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan mencakup berbagai kondisi, termasuk namun tidak terbatas pada: sumber daya yang terbatas, tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam

sistem hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak pidana, ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan nasib seseorang. cara sendiri untuk menjalani hidup sendiri.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003), Seseorang dianggap miskin jika mereka tidak mampu mempertahankan tingkat hidup minimal tertentu, dan kualitas hidup ini sering diukur dengan konsumsi. Dengan mempertimbangkan tingkat pengeluaran ini, garis kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimal dan kebutuhan dasar lainnya., dan (2) umlah persyaratan lainnya sangat bervariasi, yang menunjukkan biaya keterlibatan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa pada dasarnya ada dua cara untuk melihat kemiskinan; ini adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dicirikan oleh tingkat pendapatan dan persyaratan yang sangat rendah sehingga tidak dapat dianggap cukup bagi seseorang untuk menjalani apa yang dianggap masyarakat sebagai kehidupan yang layak. Kemiskinan absolut dapat ditentukan dengan membandingkan jumlah pendapatan seseorang dengan tingkat uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, seseorang dianggap hidup dalam kemiskinan absolut jika pendapatan yang diperolehnya lebih

rendah dari tingkat kemiskinan federal dan ia tidak dapat memenuhi kebutuhan esensialnya untuk bertahan hidup.

Jika dilihat dari kacamata ketimpangan sosial, kemiskinan relatif dapat dipahami sebagai berikut: Jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, tetapi taraf hidup mereka masih jauh lebih rendah daripada masyarakat di sekitarnya, maka itu individu dikatakan relatif miskin. Ketika ada disparitas yang lebih besar dalam tingkat pendapatan antara kelas atas dan kelas bawah, jumlah mereka yang hidup dalam kemiskinan juga lebih besar.

Kondisi Kemiskinan Dalam Pandangan Islam Istilah “miskin” berasal dari akar kata “as-sakan” yang dapat diartikan sebagai antitesis dari segala sesuatu yang selalu bergeser dan bergejolak. “Huruf sin, kaf, dan nun adalah huruf asli dan umum yang menandakan kebalikan makna dari benda yang bergerak dan bergetar, seperti dikatakan, 'Sakana asy-syai'u yaskunu sukunan sakinan,' sehingga dapat diartikan bahwa orang miskin adalah orang yang dihibur oleh kemiskinan dan dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi. Seseorang dapat dikatakan miskin jika kesehatan dan keadaannya telah membatasi mobilitasnya sampai pada titik di mana ia tidak dapat bergerak sama sekali, atau dapat dikatakan miskin jika mereka tidak meninggalkan rumah karena mereka tidak mau mengemis uang dari orang asing (Cahaya, Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadis, 2015).

Menurut apa yang telah dibahas sebelumnya, yang dimaksud dengan "miskin" adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yang meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal, sehingga menghalanginya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukannya.

2.4.5 Penyebab Kemiskinan

Sharp (1996:173-191) mencoba mengidentikasi Faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap adanya kemiskinan. Pertama, dalam skala yang lebih lokal, kemiskinan disebabkan oleh pola kepemilikan sumber daya yang tidak merata, yang pada gilirannya menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Hal ini pada gilirannya menyebabkan lingkaran setan kemiskinan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan hanya dapat mengakses sumber daya dalam jumlah sedikit dan kualitas yang buruk. Kedua, adanya disparitas kualitas sumber daya manusia yang ada, yang berujung pada kemiskinan. Kualitas sumber daya yang buruk mengakibatkan tingkat produksi yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan tingkat upah. Kualitas sumber daya manusia yang buruk dapat dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan, kerugian yang telah ditentukan sebelumnya, prasangka, atau bahkan warisan. Ketiga, disparitas dalam akses keuangan merupakan kontributor utama kemiskinan. Teori lingkaran setan kemiskinan dikemukakan oleh Nurkse pada tahun 1953. Menurut teori ini, "Bangsa yang miskin menjadi miskin karena miskin." dapat diringkas sebagai "Ketiga alasan kemiskinan ini pada dasarnya bermuara pada teori lingkaran setan

kemiskinan." Contoh berikut memberikan representasi skematis dari pendekatan lingkaran kemiskinan ini.

2.4.6 Penanggulan Kemiskinan

Ketika membahas pengentasan kemiskinan di era globalisasi ini, sering muncul pertanyaan tentang siapa yang harus memikul tanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan di negara mereka sendiri. Karena berbagai macam pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di berbagai belahan dunia, subjek ini sering muncul ke permukaan. Kita mengenal setidaknya empat model sistem (yang didasarkan pada alokasi anggaran) untuk kesejahteraan sosial, dan model ini terkait dengan model sistem kesejahteraan di berbagai negara. Model-model ini adalah sebagai berikut:

Pertama, ada model standar yang disetujui oleh semua negara di Skandinavia, termasuk Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Di dalam versi ini, pemerintah bertanggung jawab menyediakan jaminan sosial secara terlembaga dan seragam bagi seluruh penduduk negara. APBN untuk program 60% dari keseluruhan pengeluaran yang dibuat oleh negara digunakan untuk program sosial.

Kedua, model institusional yang dianut oleh jerman dan austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dikelola secara institusional dan meluas, mirip dengan model pertama. Namun, pembayaran (kontribusi penggajian) ke berbagai program jaminan sosial berasal dari tiga sumber berbeda: pemerintah, bisnis di seluruh dunia, dan karyawan.

Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Autralia dan Selandia baru. Masyarakat yang rentan, seperti fakir miskin, lumpuh, dan pengangguran lebih diutamakan untuk mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Melalui pemberian subsidi untuk pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial swasta, pemerintah menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi sosial.

Keempat, model minimal yang disepakati oleh kumpulan negara-negara Amerika Latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Italia, Chili, dan Brasil) dan Asia adalah sebagai berikut: (Korea Selatan, Filipina, Sri Lanka). Anggaran negara untuk program sangat minim, yakni kurang dari 10 persen dari keseluruhan belanja negara. Sebagai catatan tambahan, tampaknya keterbatasan sumber daya yang tersedia dalam anggaran negara untuk program kesejahteraan sosial di negara-negara Asia Tenggara dan Selatan terkait langsung dengan kecilnya anggaran masing-masing program tersebut.

Dalam hal kemajuan kesejahteraan sosial, sangat jelas bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menganut negara kesejahteraan. Meskipun bangsa Indonesia menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila), dan ketegasan konstitusionalnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial terletak pada seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Padahal prinsip keadilan sosial merupakan sila kelima Pancasila. Tugas untuk kemajuan masyarakat tidak hanya milik pemerintah tetapi juga masyarakat, sektor korporasi, dan aspek masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pemerintah,

masyarakat, bahkan dunia usaha-khususnya perguruan tinggi yang menjadi pencetak kader-kader bangsa perlu bahu-membahu untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan kemasyarakatan. Kader bangsa mengandalkan perguruan tinggi bangsa untuk mempublikasikan materinya.

Sehubungan dengan kesepakatan yang dicapai oleh sejumlah negara untuk mengentaskan kemiskinan, Indonesia tidak akan ketinggalan dalam partisipasinya dalam agenda pengentasan kemiskinan. Ada banyak inisiatif berbeda yang dijalankan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sejak awal republik ini, Kementerian Sosial telah terlibat aktif dalam berbagai inisiatif yang telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Menteri Sosial telah mengusulkan lima masalah sosial utama yang perlu ditangani oleh pemerintah. Masalah tersebut meliputi masalah kemiskinan, kecacatan, kecacatan, penelantaran, dan korban bencana baik alam maupun sosial. Menteri Sosial telah mengajukan proposal tersebut. Tanpa mengabaikan pentingnya isu-isu lainnya. Memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah kemiskinan adalah masalah yang paling mendesak. Semua masalah masyarakat dapat ditelusuri kembali ke kemiskinan. Masalah utama yang dimainkan dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan dan kesepakatan masyarakat global. Selain itu, Kementerian Sosial memandang masalah kemiskinan global sebagai salah satu prioritas utamanya. Kemensos juga menilai pengentasan kemiskinan merupakan isu tinggi yang harus digarap. Alokasi anggaran Departemen Sosial pada tahun 2006 lebih dari 2,2 triliun rupiah,

dan telah disalurkan ke 5 kelompok sasaran, dengan alokasi untuk pengentasan kemiskinan lebih dari 566 miliar rupiah. 207 milyar rupiah sumber daya yang terbuang sia-sia Cacat Rp. 54 miliar. 41 miliar pendapatan yang hilang karena kelemahan dan bencana alam, dan Rp. 500 miliar dalam biaya sosial.

Ekonom India Amartya Sen, yang dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1998, berbicara tentang penyebab kemiskinan dan keterbelakangan dalam bukunya yang berjudul "Development as Freedom." Dikatakannya, akar kemiskinan dan keterbelakangan adalah sulitnya aksesibilitas. Karena kendala (bahkan bukan pilihan) untuk mengembangkan hidupnya, kecuali orang menjalankannya secara otonom terpaksa apa yang bisa dilakukan saat ini (bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan), apa yang bisa dilakukan saat ini bukanlah apa yang seharusnya. mampu dilaksanakan.

Akibatnya, kemampuan manusia untuk berkembang dalam kehidupan akan terbatas, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat akan berkurang (Sen, 1999). Sen merujuk pada keberadaan jaring pengaman sosial, serta aksesibilitas dan fasilitasi kebebasan politik, peluang ekonomi, peluang untuk menerima layanan sosial (seperti pendidikan dan perawatan kesehatan), dan transparansi.

Menurut teori Amartya Sen, kebutuhan minimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah akses pemenuhan kebutuhan sehari-hari, akses fasilitas yang terjangkau dan layak untuk kesehatan, serta akses untuk menikmati pendidikan. Gagasan ini sudah ada sejak lama dan diartikulasikan

oleh para founding fathers Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar Republik ini.

Pasal 29, 31, 33, dan 34 UUD 1945 yang telah diratifikasi pada tahun 1945 secara jelas dan tegas menuntut agar setiap orang berhak atas akses atas sarana yang diperlukan untuk hidup layak, termasuk hak atas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Padahal, fakir miskin dan anak-anak yang dianiaya oleh negara merupakan keadaan sempurna yang diatur oleh sistem hukum kita. Tentunya dengan fokus yang kuat ditempatkan pada peran yang dimainkan oleh pemerintah tingkat nasional dan lokal.

Mulai tahun 2010, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Dengan cara yang lebih terorganisir, pemerintah mulai melaksanakan rencana percepatan pengentasan kemiskinan melalui pembentukan organisasi ini. Upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan disusun dalam empat kelompok program utama. Kelompok pertama, kelompok program pengentasan kemiskinan yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial, bertujuan agar masyarakat miskin dapat memenuhi hak-hak dasarnya, mengurangi tekanan hidup sehari-hari, dan melihat peningkatan kualitas hidup mereka. hidup. Inisiatif publik yang berfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat untuk memerangi kemiskinan merupakan klaster kedua. Kategori ketiga adalah kelompok program

preventif, yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi usaha mikro dan kecil sebagai solusi kemiskinan.

Kelompok keempat berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat umum melalui pelaksanaan program, dan memusatkan perhatiannya pada masalah ini. Pertimbangan empat prinsip utama pengentasan kemiskinan yang komprehensif—yaitu, peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan inklusif—diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Mengacu pada prinsip-prinsip utama tersebut, strategi pengentasan kemiskinan terdiri dari: I mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kapasitas dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai inisiatif yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Yaitu, Secara lebih spesifik, kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program lainnya. dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi disebut sebagai prakarsa pemberdayaan ekonomi. Di tingkat nasional, program-program yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dapat

dikategorikan ke dalam kategori berikut, tergantung pada basis target (peenerima program) dan tujuan program, menjadi:

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.

1. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong tumbuhnya potensi dan membangun kemampuan kelompok masyarakat prasejahtera agar dapat berperan serta dalam kegiatan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keadaan ekonomi dengan memfasilitasi akses bagi individu dan perusahaan yang beroperasi pada skala mikro dan kecil.
3. Program-program lain Dengan mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha skala mikro dan kecil, tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang ada saat ini.

Agar syarat koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan terpenuhi di tingkat daerah, Pemerintah melalui Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan TKPK Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Lembaga ini berfungsi sebagai mitra kerja TNP2K, yang dibentuk di tingkat nasional dengan Perpres yang sama. TKPK

Daerah bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh TNP2K. Hasil pelaksanaan tugas tersebut masing-masing dilaporkan oleh TKPK Provinsi kepada Gubernur dan TNP2K; dan oleh TKPK Kabupaten (Kota) kepada Bupati (Walikota) dan TKPK Provinsi.

Dalam rangka mendukung penguatan substansi terkait pelaksanaan tanggung jawab tersebut, TKPK Daerah perlu melakukan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, khususnya dalam menganalisis kondisi kemiskinan daerah; (ii) merancang anggaran atau pengeluaran yang efektif untuk pengentasan kemiskinan di daerah; dan (iii) mengembangkan instrumen yang tepat untuk melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Hal ini diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban TKPK Daerah untuk mendukung penguatan substansi terkait pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Untuk menjalankan peran koordinasi dan pengendaliannya, TKPK Daerah paling tidak perlu memiliki kesadaran yang menyeluruh terhadap beberapa hal berikut:

1. Prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.
2. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, sesuai prinsip prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif.

3. Unifikasi data kemiskinan, sebagai kebutuhan mendesak dalam pelaksanaan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.
4. Kelompok program penanggulangan kemiskinan dan tantangan tipikal dalam penyelenggaraannya;
5. Mekanisme dan instrumen koordinasi dan pengendalian bagi setiap kelompok program tersebut.

Prinsip pertama adalah memperkuat dan memperluas bentuk perlindungan sosial yang ada bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan. Dua komponen yang membentuk perlindungan sosial adalah bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Orang-orang yang berada dalam situasi yang sangat genting, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan yang parah, mereka yang secara fisik, mereka yang sudah lanjut usia, atau mereka yang tinggal di tempat yang jauh, berhak menerima bantuan sosial. Tingkat kerentanan yang tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan kemungkinan besar individu jatuh ke dalam kemiskinan. Perlu dibuat program-program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat yang tidak miskin menjadi miskin dan mereka yang saat ini miskin menjadi lebih buruk lagi. Jika masalah ingin dicegah agar tidak bertambah parah, maka program-program ini perlu dilaksanakan.

Berdasarkan basis sasaran (penerima manfaat) dan tujuannya, program-program penanggulangan kemiskinan bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Ini dapat berupa Bantuan langsung upaya penanggulangan kemiskinan kepada keluarga yang memenuhi kriteria sasaran program. Ini

dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program transformasi program rastra yang memastikan program semakin tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, dan tepat administrasi. BPNT dikembangkan untuk menjamin hal tersebut. Mulai tahun 2017, inisiatif BPNT melalui implementasi bertahap dan sejak itu diperluas hingga mencakup area lain. Program BPNT dilaksanakan di daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur nontunai, sinyal telekomunikasi, dan akses geografis. Akibat keterbatasan tersebut, transformasi program Rastra menjadi program BPNT telah selesai dilakukan di seluruh kabupaten dan kota. Ke depannya, program BPNT mungkin dapat digabungkan dengan banyak program bantuan sosial lainnya dengan menggunakan sistem perbankan.

2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model koseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai fakor yang telah didefinisikan sebagai masalah terhadap objek yang akan diteliti.

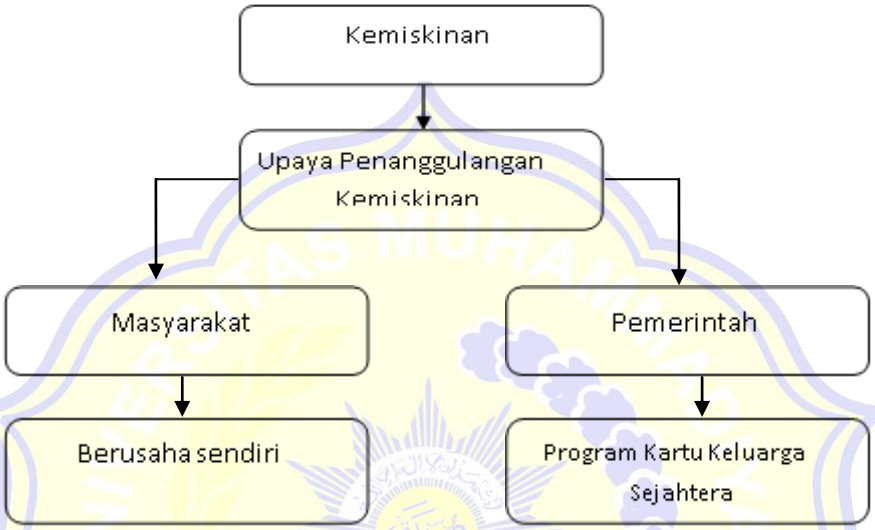

Gambar 2.2. Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua pristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang dirumuskan pada permasalahan. Menurut Sugiyono (2019:18) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksprimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi. Jadi disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan Bahasa yang menggunakan metode alamiah. Menurut sugiyono (2012:13) deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan yang lain.

Dengan menggunakan penelitian ini akan memudahkan peneliti menggali fakta dan memperoleh data yang valid dalam rangka untuk mengetahuai Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam

Menanggulangi Kemiskinan di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di ambil penulis berlokasi di Desa Setanggor, Kecamata Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Setanggorterdapat 14 dusun diantaranya, Setanggor Timur 1, Setanggor Timur 2, Setanggor Timur 3, Rungkang, Mertak Seni, Setanggor Barat 1, Setanggor Barat 2, Bilang Beke, Temopoh, Jalan Unde, Pondok Rejeng, Montong Waru, Montong Buwuh, Dan Tiu Borok. Desa Setanggormemilki jumlah penduduk sebanyak 4270 diantaranya jumlah laki-laki 2097 dan jumlah perempuan 2173 berdasarkan data profile update tahun 2021.

Adapaun kejelasan lokasi penelitian dapat dilihat pada peta dibawah, sebagai berikut :

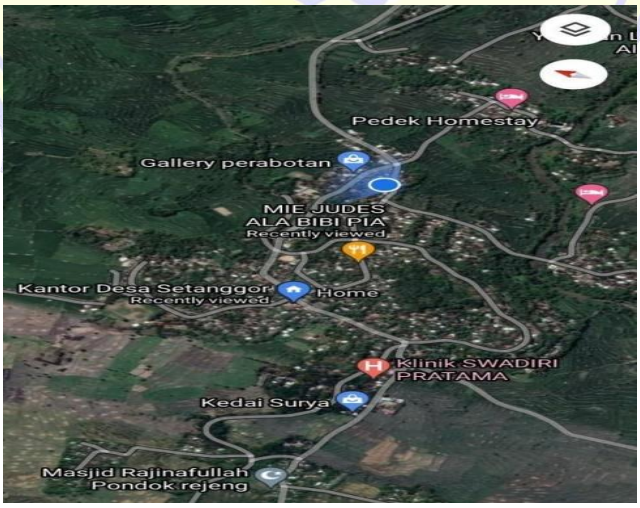

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan juni 2022 sampai bulan juli 2022.

3.3 Penentuan Responden dan Informan

Informan atau narasumber adalah orang atau tokoh yang di anggap mengetahui dengan baik informasi valid keada peneiti. Dalam penelitian deskriptif, pemlilihan narasumber sangat penting mengingat informan merupakan sumber utama pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

Sedangkan responden dalam penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan stratified random sampling dengan membagi populasi kedalam strata.

Adapun pemilihn responden dengan menggunakan teknik purposive, dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah	1
2	Kepala Desa	1
3	Pendamping KKS	1
4	KPM	3

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan penelitian secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya lasung data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung di lokasi peneitian.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut sugiyono (2010:193) sekunder adalah " sumber yang tidak lasung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen ". Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, memepelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pda literartur dan buku-buku perpustakan atau data-data dari instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2013:224) tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama yang dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data, apabila peneliti tidak mengetahui tekhnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dibutuhkan yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun beberapa macam tekhnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.5.1 Observasi / pengamatan

Widoyoko (2014:46) mendefinisikan obsevasi/pengamatan merupakan proses pengamatan dan pencatatan seara sistematis unsur-unsur yang ditemukan dala suatu gejala pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, penliti akan melakkan observasi baik secara tidak langsung maupun secara lasung pada peranan petugas lapangan kartu keluarga sejahtera (KKS) dan pada masyrakat desa setanggor. Observasi bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi perhatian pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera di Desa Setanggor kecamatan Praya Barat

3.5.2 Wawancara

Menurut Afifudin (2009:131) wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada yang menjadi informasi/narasumber. Dalam penlitian ini, untuk mengumpulkan data-data dari informasi yang dibutuhkan terkait kartu keluarga sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa setanggor, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara terstruktur. Dengan memungkinkan pertanyaan-pertanyaan baru muncul sehingga penelitian dapat menggali informasi lebih mendalam.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yaitu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan yang dimaksud yaitu seperti catatn harian, sejarah kehidupan (life

histories). Cerita, biografi, pengaturan dan berupa poto, gambar hidup, sketsa dan lain lain.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan dokumen dan mengumpulkan beberapa gambar terkait pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk memeprkuat tingkat kevalidan data yang diperoleh.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:67) variabel penelitian adalah segala aspek dari suatu penelitian yang dapat dipelajari untuk mengumpulkan informasi. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

3.6.2 Definisi Oprasional

a. Peran KKS adalah perilaku yang dilakukan KKS dalam menjalankan program-programnya. Dalam menjalankan program nyata yang meliputi sosialisasi/penyuluhan dan binaan dalam penerimaan bantuan KKS. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam menjalankan pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS) yaitu dengan agen-agen atau pendamping, serta penerima KKS itu sendiri.

b. Keluarga sejahtera merupakan pencapaian dari program KKS. Adapun kriteria keluarga sejahtera yaitu yang memiliki hidup yang adil dan makmur.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar untuk mendapatkan gambaran umum tentang data tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat mengklasifikasikan dan mengelompokkan data sesuai dengan kriteria masing-masing guna mendapatkan gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

3.7.1 Reduksi Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dari menelaah data-data yang telah terkumpul melalui angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah memeriksa semua data, langkah selanjutnya adalah mereduksi data dengan cara memusatkan perhatian, menyederhanakan dan mentransformasikan data sebelum terkumpul seluruh

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun yang memberikan kemungkinan untuk menarikkesimpulan dan penentuan tindakan selanjutnya. Dalam penulisan penelitian deskriptif , penyajian data biasa dilakukan adalah bersifat teks naratif dengan bentukuraian singkat, bagan, grafik, hubungan anatar kategori dan sejenisnya. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk padu dan mudah diraih sehingga memudahkan unuk melihat fenomena yang terjadi.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap paling akhir yang dilalui peneliti baik dalam analisis data kualitatif maupun kuantitatif. Selama melakukan penelitian lapangan, peneliti terus berupaya membuat kesimpulan tentang temuan mereka. Temuan awal dan kesimpulan yang ditarik oleh para peneliti bersifat sementara dan dapat berubah-ubah jika tidak dapat ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, sebuah kesimpulan adalah penemuan baru yang mungkin berbentuk deskripsi atau gambaran dari suatu onjek yang sebelumnya kurang jelas tetapi menjadi lebih jelas setelah dianalisis.